

Implementasi Penataan Naskah Dinas Elektronik Melalui E Buddy Sidoarjo Desa Panggreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Ayum Hanifah

Isnaini Rodiyah

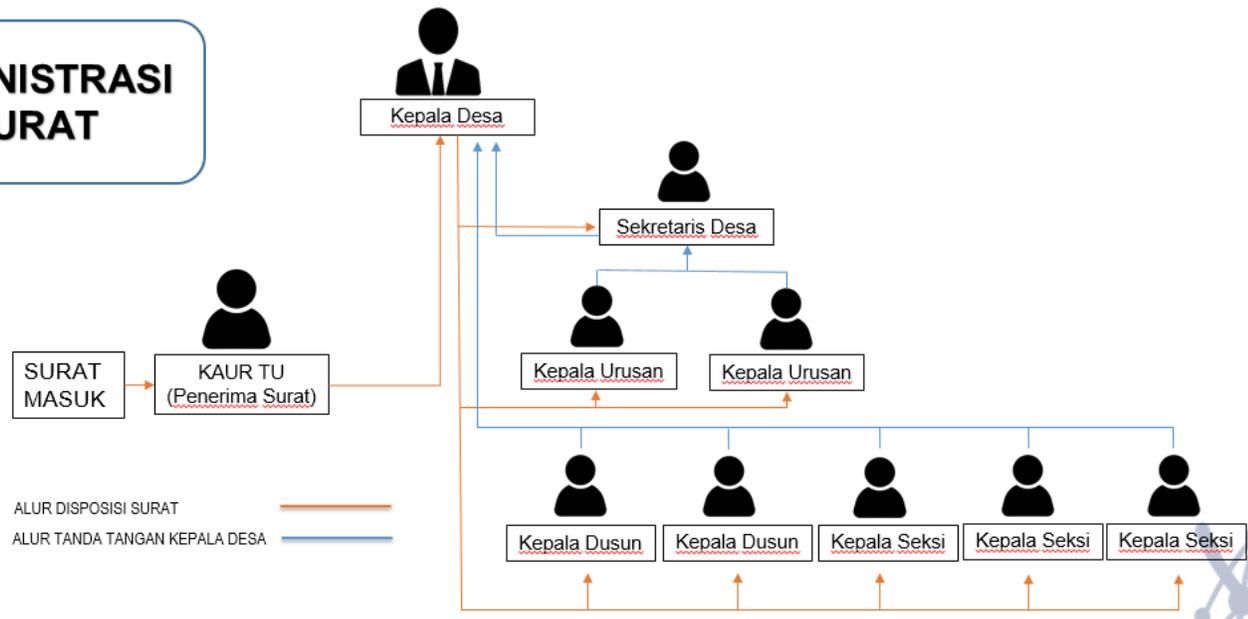
Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari, 2024

Pendahuluan

ADMINISTRASI SURAT



Pemerintah adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan dan penyelenggaraan urusan publik dalam suatu negara atau wilayah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan sebuah pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga bisa memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan sistem administrasi yang baik. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, serta memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia termasuk dalam administrasi pemerintahan. Sistem manajemen dokumen elektronik memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan pencarian dokumen yang lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan sistem manual berbasis kertas.

Usaha Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mewujudkan administrasi surat menyurat yang efektif dan efisien adalah dengan membuat aplikasi naskah dinas berbasis elektronik yaitu E Buddy Sidoarjo. Program e buddy ini di respond dan di implementasikan di seluruh desa di kabupaten Sidoarjo dengan harapan kegiatan koordinasi antar institusi berjalan lebih efektif dan efisien.

Salah satu pemerintah desa yang ada di kabupaten Sidoarjo yang mengakomodir pelaksanaan E government dalam bentuk aplikasi E Buddy adalah Pemerintah Desa Pangreh. Bisa kita lihat bahwa apabila dalam proses surat masuk ataupun surat keluar ini mengalami kendala, maka proses surat menyurat menjadi tidak lancar.

Gap Permasalahan



- Sudah tersedia aplikasi penataan naskah dinas elektronik melalui E Buddy Sidoarjo namun masih ada penyampaian informasi melalui aplikasi Whatsapp

Data Empiris

Tabel 1. Pengelolaan surat pada akun E Buddy Desa Pangreh

No	Tahun	Surat Masuk	Surat Keluar	Disposisi oleh Kaur TU	Disposisi Kepala Desa kepada Kaur/Kasi
1	2020	22	1	22	0
2	2021	203	132	203	0
3	2022	315	385	315	0
4	2023	313	380	301	0

Sumber : hasil olah penulis sampai dengan bulan Oktober 2023 dari Pemerintah Desa Pangreh.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)



Bagaimana Implementasi Aplikasi E Buddy di Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo?

Penelitian Terdahulu

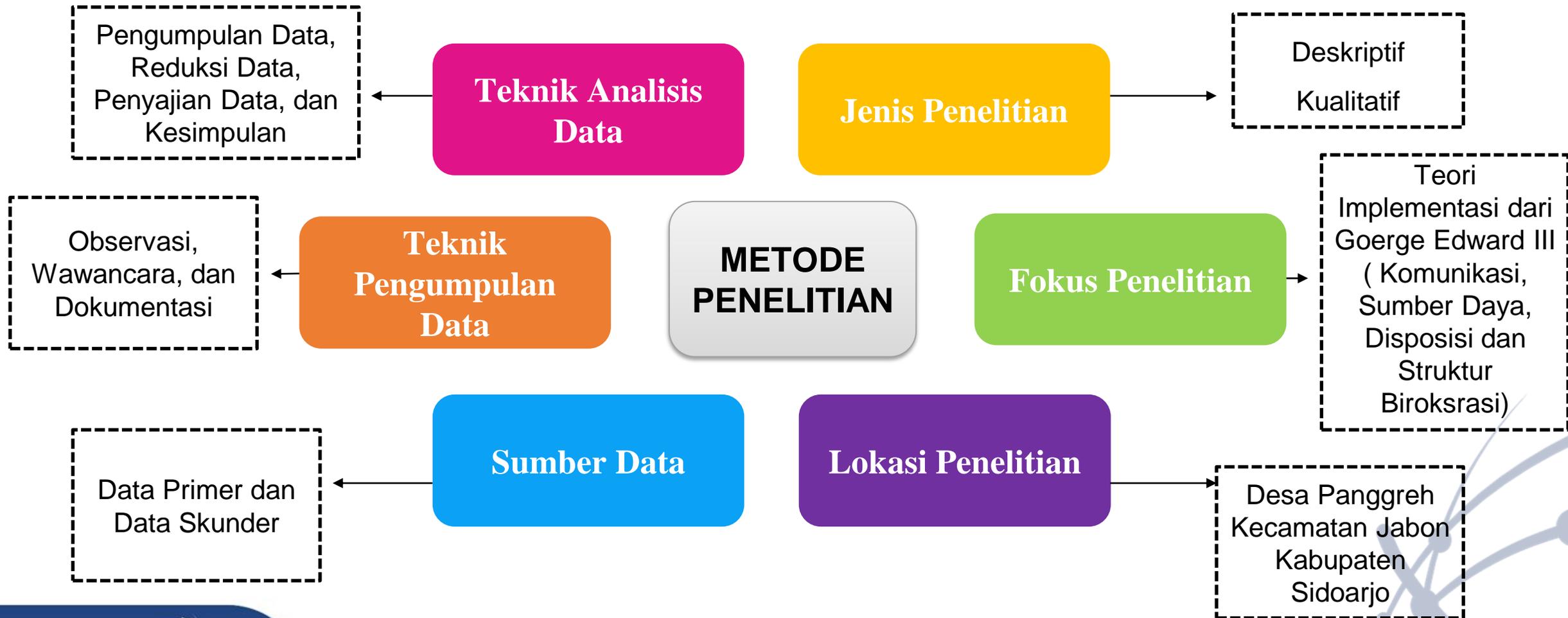
Harvi Dasnoer , Aldri Frinaldi , dan Lince Magriasti, 2023 dengan judul : Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang.

An Nisa Nur Amalia ,Afifuddin, dan Hayat, 2019 dengan judul : Implementasi E-Document Dalam Pengelolaan Surat Masuk Dan Keluar (Studi Kebijakan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Bagian Umum Balai Kota Malang, Jawa Timur).

M. Zidan Syauqi , Agus Prasetyawan, 2023 dengan judul : Efektivitas Penerapan Absensi Berbasis Aplikasi “E-Buddy” Dalam Menunjang Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo).

Dari ketiga penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa meskipun fasilitas – fasilitas pendukung surat elektronik sudah tersedia dengan baik, namun penggunaan aplikasi masih belum optimal karena masih terdapat pegawai yang gagap teknologi dan kurangnya kemauan untuk belajar.

Metode



Hasil dan Pembahasan

1. KOMUNIKASI

Dilihat dari sub indicator yang pertama yakni komunikasi, terdapat dua kali pertemuan untuk sosialisasi program kebijakan tersebut yang terdiri dari satu kali pertemuan melalui chanel youtube dan satu kali pertemuan offline dan hanya satu pegawai yang di undang dalam sosialisasi tersebut, hal ini membuat pegawai kurang maksimal dalam memahami penggunaan aplikasi E Buddy.

Kemudian sub indicator kejelasan, telah dilakukannya sosialisasi sekaligus bimbingan teknis secara online membuktikan bahwa sosialisasi terkait implementasi aplikasi E Buddy Sidoarjo sudah terlaksana.

Dan sub indicator ketiga konsistensi, penyampaian informasi surat dinas masih belum konsisten hal tersebut dikarenakan penyampainnya masih ada yang menggunakan aplikasi whatsapp.

Hasil dan Pembahasan

2. SUMBER DAYA

Sumber daya manusia disini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan secara efektif di Desa Pangreh. konteks sumber daya manusia, berdasarkan temuan dalam penelitian diketahui bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu hambatan bagi pelaksana kebijakan yang berimplikasi pada kinerja yang dihasilkan. Kendala yang dimaksud ialah kapasitas pengguna aplikasi E Buddy pada Pemerintah Desa Pangreh yang masih belum menguasai teknologi dan penggunaan aplikasi. Untuk kewenangan Pemerintah Desa Pangreh mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo No. 98 tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Tertulis bahwa yang bertanggung jawab atas implementasi aplikasi e-buddy adalah Kaur TU. sedangkan untuk sarana dan prasarana yang tersedia diantaranya wifi, ruangan ber Ac, dan Komputer yang dapat menunjang proses jalannya implementasi kebijakan. Akan tetapi dari hasil temuan di lapangan peneliti masih menemukan adanya computer di Desa Pangreh yang sudah harus di upgrade software sehingga kecepatan dalam menjalankan aplikasi E Buddy lebih cepat dan tepat.

Hasil dan Pembahasan

3. DISPOSISI

Pertama pengangkatan birokrat atau pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga. Diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan secara konsisten dengan mempersiapkan sumber daya manusia maupun kelembagaan lewat program sosialisasi yang relevan, walaupun demikian program tersebut hanya terjadi dua kali pertemuan yang diselenggarakan sejak kebijakan diturunkan. Oleh karena itu melihat fakta dilapangan tidak dapat diharapkan sebagai pelaku sumber daya manusia dapat menguasai penggunaan aplikasi E Buddy seperti yang diharapkan.

Kedua Insentif, Insentif merupakan indikator yang mempengaruhi sikap dalam proses implementasi. Penerapan sanksi sebagai upaya penanaman disiplin yang akan memberi kontribusi pada dukungan sikap pelaku sumber daya belum diupayakan melalui aktivitas-aktivitas yang menggalang kebersamaan serta penilaian kinerja individu para pengguna aplikasi E Buddy, seperti DP3 dan laporan kinerja secara berkala.

Hasil dan Pembahasan

3. STRUKTUR BIROKRASI

Struktur organisasi pemerintahan desa Pangreh menunjukkan bagaimana kegiatan kerja dipisahkan satu sama lain dan bagaimana hubungan antara kegiatan dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi ini, pola koordinasi yang ada menunjukkan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dan setiap bagian organisasi berhubungan dengan rantai komando langsung melalui Kepala Desa. Struktur birokrasi desa yang ada mendukung implementasi aplikasi E-Buddy, namun masih diperlukan penyesuaian lebih lanjut agar sepenuhnya sesuai dengan peraturan bupati terkait naskah dinas elektronik.

Kesimpulan

Implementasi aplikasi E-Buddy di Desa Pangreh telah membantu dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan administrasi desa. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, terutama dalam hal sumber daya manusia dan pemahaman teknis.

Referensi

1. Vanya Karunia Mulia Putri, Serafica Gischa (18/08/2021) Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Administrasi: Pengertian, Tujuan, Ciri-Ciri, Fungsi, dan Jenisnya", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/18/154901669/administrasi-pengertian-tujuan-ciri-ciri-fungsi-dan-jenisnya#google_vignette
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
3. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penataan Naskah Dinas Elektronik
4. Nugroho, D. R. 2011. Public Policy Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
5. AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar
6. Dasnoer, H., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kecamatan Padang Utara Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(16), 319-324.
7. An Nisa Nur Amalia ,Afifuddin, dan Hayat (2019). Implementasi E-Document Dalam Pengelolaan Surat Masuk Dan Keluar (Studi Kebijakan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Bagian Umum Balai Kota Malang, Jawa Timur).
8. Syauqi, M. Z., & Prastyawan, A. . (2023). EFEKTIVITAS PENERAPAN ABSENSI BERBASIS APLIKASI “E-BUDDY” DALAM MENUNJANG DISIPLIN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI KASUS SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDOARJO). *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant)*, 1(4), 28–40.
9. Maleong, L.J. 2015. Metode Penelitian Kualitatif: Bandung : PT Remaja
10. Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d. Suarwelni, w. (n.d.). Metodologi penelitian. Bandung: alfabeta
11. Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO



TERIMA KASIH